

Jurnal Agregasi

Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi

Volume 9 / Nomor 1 / Tahun 2021 / Hal 1 - 117

The Impact of Decentralization On Education Services in The Borneo Border Area
Surya I, Budiman B, Syarifuddin T dan Nurmiyati N

Quality of APBD According To The Perspective of Community Participation And
Transparency of Public Policy
Anggadini S, Rohmawati T, Damayanti S dan Brasmasto A

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan
Puspitawati L dan Effendy M

Manajemen Strategi Penerapan Kebijakan Kurikulum 2013 oleh Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang
Rahmasari A, Yulyana E dan Febriantini K

Open Government in Grassroot Level Government
(Study of Website Quality in Pejambon Village, Bojonegoro)
Kusnan K, Asmorowati S dan Setijaningrum E

Dampak Kebijakan Pelanggaran Cantrang Pada Nelayan Cantrang di Kecamatan Brondong
Kabupaten Lamongan
Harum A, Saiman S dan Sihidi I

**PRODI ILMU PEMERINTAHAN
FISIP UNIKOM**

p-ISSN : 2337-5299
e-ISSN : 2579-3047

Editor in Chief

Tatik Rohmawati, Government Studies, Faculty of Social and Political Sciences
Universitas Komputer Indonesia

(Orcid ID : [0000-0001-6422-567X](#), Scopus ID: [57212086696](#), [Google Scholar](#) ,
Sinta ID: [258739](#))

Editorial Board

1. Nia Karniawati, Universitas Komputer Indonesia
([Google Scholar](#), Sinta ID: [259065](#))
2. Dewi Kurniasih, Universitas Komputer Indonesia
([Google Scholar](#), Sinta ID: [259139](#))
3. Fernandes Simangunsong, IPDN, Indonesia
(Scopus ID: [57209008049](#), [Google Scholar](#) , Sinta ID: [6060148](#))
4. Ahmad Harakan, Unismuh Makassar, Indonesia
([Google Scholar](#), Sinta ID: [186789](#))
5. Rino Adibowo, Universitas Komputer Indonesia
([Google Scholar](#), Sinta ID: [6035483](#))
6. Tatik Fidowaty, Universitas Komputer Indonesia
([Google Scholar](#), Sinta ID: [6098702](#))
7. Yusuf Adam Hilman, Universitas Muhammadiyah Ponorogo
([Google Scholar](#), Sinta ID : [163441](#))







[Home](#) / [Archives](#) / Vol 9 No 1 (2021)

DOI: <https://doi.org/10.34010/agregasi.v9i1>


Articles




THE IMPACT OF DECENTRALIZATION ON EDUCATION SERVICES IN THE BORNEO BORDER AREA

 Iman Surya, Budiman Budiman, Tengku Imam Syarifuddin, Niken Nurmiyati

 2021-05-01  View : 242 Times  Download : 643 Times




QUALITY OF APBD ACCORDING TO THE PERSPECTIVE OF COMMUNITY PARTICIPATION AND TRANSPARENCY OF PUBLIC POLICY

 Sri Dewi Anggadini, Tatik Rohmawati, Sari Damayanti, Ari Bramasto


 2021-05-02  View : 315 Times  Download : 401 Times




ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS KEUANGAN

 Lilis Puspitawati, Mega Marisa Effendy


 2021-05-02  View : 250 Times  Download : 661 Times




MANAJEMEN STRATEGI PENERAPAN KEBIJAKAN KURIKULUM 2013 OLEH DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARAWANG

 Annisa Ayu Rahmasari, Eka Yulyana, Kariena Febriantini


 2021-05-02  View : 286 Times  Download : 202 Times




OPEN GOVERNMENT IN GRASSROOT LEVEL GOVERNMENT (STUDY OF WEBSITE QUALITY IN PEJAMBON VILLAGE, BOJONEGORO)

 Kusnan Kusnan, Sulikah Asmorowati, Erna Setijaninrum

 2021-05-04  View : 206 Times  Download : 299 Times

DAMPAK KEBIJAKAN PELARANGAN PENGGUNAAN CANTRANG PADA NELAYAN CANTRANG DI KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

 Alfi Azhari Hanum, Saiman Saiman, Iradhad
Taqwa Sihidi

 2021-05-09  View : 714 Times  Download : 1117
Times

Search within this journal

Search

Editorial Board

Reviewer

Submission Guideline

Author Guideline

Publication Ethics

Focus & Scope

Peer Review Process

Copyright Notice

Open Access Policy

Plagiarism Policy

Publication Fee

Indexing

KUALITAS APBD MENURUT PERSPEKTIF PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK

Sri Dewi Anggadini ¹⁾ *, Tatik Rohmawati ²⁾, Sari Damayanti ³⁾, Ari Bramasto ⁴⁾

¹⁾ Program Studi Akuntansi, Universitas Komputer Indonesia. Jalan Dipatiukur No. 102-116, Kota Bandung, Jawa Barat, 40132, Indonesia.

²⁾ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Komputer Indonesia. Jalan Dipatiukur No. 102-116, Kota Bandung, Jawa Barat, 40132, Indonesia.

³⁾ Manajemen Bisnis Syariah, Institut Agama Islam Shalahuddin Al-Ayyubi, Jalan Sultan Hasanudin No. 203/226 Tambun Selatan Bekasi 17510, Indonesia

⁴⁾ Program Studi Akuntansi, Universitas Langlang Buana. Jl. Karapitan No.116, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261, Indonesia.

* Korespondensi Penulis. E-mail: sri.dewi@email.unikom.ac.id, Telp: +628122421004

Abstrak

Hal ini bertujuan untuk mengetahui kualitas APBD dari perspektif partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Faktor pengujian meliputi Partisipasi masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai variabel independen. Kualitas APBD merupakan variabel terikat. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian verifikatif deskriptif. Populasi yang diteliti yakni pegawai Sub-Bagian Keuangan dan Sub-Bagian Program dan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yakni metode sensus (sampel jenuh), sehingga jumlah sampel yang diambil dan diolah sebanyak 36 sampel data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pegawai Subbagian Keuangan dan Sub-bagian Program dan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil penelitian memberikan gambaran selama pelaksanaan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik dilakukan saat ini (berjalan) dengan cukup baik, dan APBD yang dilaksanakan memiliki kualitas yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan masih adanya kekurangan dalam implementasi yang belum mencapai level optimal. Dapat disimpulkan bahwa APBD yang berkualitas tidak lepas dari faktor partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Semakin baik transparansi kebijakan publik dan partisipasi masyarakat, maka akan semakin baik pula kualitas APBD kedepannya.

Kata kunci: Transparansi Kebijakan Publik, Partisipasi Masyarakat, Kualitas APBD.

QUALITY OF APBD ACCORDING TO PERSPECTIVE OF COMMUNITY PARTICIPATION AND TRANSPARENCY OF PUBLIC POLICY

Abstract

Aims to determine quality APBD from perspective of public participation and transparency of public policy. Factors tested in this study were Community Participation and Public Policy Transparency as independent variables. While the Quality of APBD as a dependent variable. Method used is a descriptive verifikative method. Population is all employees of Sub Division of Finance and Sub



JURNAL AGREGASI
Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam
Demokrasi
Volume 9–Nomor 1, Mei 2021



DOI: [10.34010/agregasi.v9i1.4121](https://doi.org/10.34010/agregasi.v9i1.4121)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

Division of Programs and Budgets of South Coastal District Health Office. Sampling technique used is to use census method (saturated sample), so number of samples used is 36 sample data. Method of data collection by distributing questionnaires to employees of Sub Division of Finance and Sub Division of Programs and Budgets of the South Coastal District Health Office. For results showed that Implementation of Community Participation and Transparency of Public Policy was implemented fairly well, as well as the APBD carried out has a high quality. This indicates that there are still shortcomings in implementation that have not reached the optimal. Concluded quality APBD is inseparable from factors of public participation and transparency of public policy. Better transparency of public policy and public participation, more qualified APBD will be.

Keywords: *Transparency of Public Policy, Public Participation, Quality of APBD*



PENDAHULUAN

Lembaga Administrasi Negara dalam (Sari & Tamrin, 2017) menyatakan yang disebut dengan *Good Government Governance* yang dalam praktiknya dengan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid, bertanggungjawab, efisien, dan efektif. Yakni dengan cara menjaga sinergis, dan interaksi yang konstruktif antar domain negara, sektor swasta, dan juga masyarakat. Dari pernyataan diatas kita bisa mengatakan bahwa agar terselenggaranya proses pembangunan pemerintahan yang baik pemerintahan yang berada didaerah juga ikut sejalan dengan pemerintahan pusat. Pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan serta memanfaatkan teknologi dan informasi yang ada di daerah agar pengelolaan keuangan meningkat dan memberikan semua informasi kepada publik untuk tercapainya transparansi kebijakan publik. Chortareas et al., (2003) menyampikan persepsi di antara pembuat kebijakan adalah bahwa transparansi dapat mempercepat pembangunan kredibilitas dengan meyakinkan publik tentang tekad mereka untuk memerangi inflasi dan dengan demikian membawa ekspektasi inflasi lebih cepat sejalan dengan kebijakan.

Hal berikut ini, yang perlu pemerintah daerah lakukan dalam melakukan pembangunan yaitu

membuat penganggaran (APBD) di daerah itu sendiri. Dasarnya APBD bersumber dari uang rakyat, maka kepentingan rakyat perlu diutamakan terdahulu dalam penganggaran. Sehingga rakyat dapat merasakan manfaatnya sebaik mungkin dan juga dapat menjadi pembangunan yang berjalan baik sebagai *continuously process*. Menurut Badrudin, n.d. menyatakan APBD yakni cara pemerintah daerah mencakup keseluruhan pendapatan/ penerimaan belanja, pengeluaran pemerintah baik pada tingkat kota, kabupaten, provinsi, daerah, dan berguna untuk menggapai apa yang menjadi sasaran dalam pembangunan singkat, yaitu dengan pembangunan 1 (satu) tahun, dengan satuan uang, lalu berikutnya harus disetujui oleh DPRD yang tertuang dalam Peraturan Daerah (PERDA). APBD sendiri merupakan rencana pekerjaan keuangan jangka waktu tertentu, yang mana DPRD memberikan kredit kepada Badan Eksekutif (BE). Kepala Daerah melakukan pembiayaan dalam kebutuhan rumah tangga daerah berupa penetapan anggaran rancang. APBD juga ditujukan agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat pemborosan sumber daya, meningkatkan perekonomian serta keadilan dan kepatutan, maka dari itu anggaran digunakan oleh badan eksekutif untuk menjamin

kesinambungan pembangunan dan meningkatkan kehidupan masyarakat agar tercapainya anggaran yang berkualitas. Pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan atau dana untuk melakukan penganggaran terhadap keuangan agar terlaksananya pembangunan. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintah daerah harus melakukan pembangunan dengan transparansi serta adanya partisipasi masyarakat.

Dalam melaksanakan pembangunan pemerintah daerah haruslah melakukan anggaran (APBD) yang dilakukan oleh daerah tersebut. Halim & Kusufi (2016) menyebutkan bahwa Anggaran adalah dokumen berisi tentang estimasi kinerja, berupa penerimaan dan pengeluaran, disajikan berupa ukuran moneter berdasarkan pencapaian pada periode waktu tertentu dan menyertakan *history data*, untuk pengendalian dan penilaian kinerja. Anggaran biasanya diberikan kepada DPRD untuk disetujui sebagai anggaran daerah tersebut. DPRD juga harus melakukan pengawasan dalam memberikan persetujuan terhadap anggaran yang diberikan. Pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dilakukan haruslah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan sesuai dengan tolak ukur yang ada agar efektif dan efisien guna mencapai pemerintahan bersih dengan

menggunakan prinsip partisipasi dan transparansi kebijakan publik.

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana berperan sebagai sarana bagi masyarakat itu sendiri baik secara individu, kelompok masyarakat ataupun organisasi masyarakat dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingan sehingga proses kebijakan daerah yang akan ditetapkan lebih condong terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Innes & Booher (2004) partisipasi perlu melakukan kolaborasi keterlibatan warga negara, dan juga kepentingan terorganisir, organisasi pembuat keuntungan dan non-profit, perencana dan administrator publik dalam rangka bersama, saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Ini bukan komunikasi satu arah dari warga negara ke pemerintah atau pemerintah ke warga negara. Ini adalah model multi-dimensi di mana komunikasi, pembelajaran, dan tindakan digabungkan dan di mana pemerintahan, kepentingan, dan warga negara berkembang bersama.

Partisipasi adalah kunci dalam pelaksanaan otonomi daerah, praktiknya terdapat berbagai aspek pengawasan dan aspirasi. sebagaimana disampaikan oleh Achmadi et al., (2002). Menurut Mardiasmo (2002) baik dalam penyusunan, ratifikasi, pelaksanaan,

hingga pertanggung jawaban harus melibatkan partisipasi masyarakat. Prinsip yang harus diperhatikan tidak hanya partisipasi masyarakat prinsip lain seperti salah satunya transparansi kebijakan publik juga harus diperhatikan. Menurut Anggadini (2013), diperlukannya transparansi agar informasi informasi dapat diakses oleh masyarakat sehingga dapat dilakukannya partisipasi. Informasi yang diperoleh dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan bagi pimpinan organisasi. Informasi tersebut digunakan manajer dengan tujuan mengetahui kinerjanya seperti yang disampaikan oleh Suhayati, dan Sri Dewi Anggadini (2014). Informasi harus tersedia pada saat dibutuhkan, dan informasinya tidak boleh terlambat, hal tersebut dinyatakan oleh Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011). Graversgaard et al., (2017) peluang untuk melibatkan publik dengan menggunakan keterlibatan pemangku kepentingan dan pendekatan partisipatif dalam struktur pemerintahan baru menunjukka perubahan yang signifikan di sebagian besar Negara-negara Eropa.

Pada penelitian Maisarah (2014) di kota Banda Aceh faktanya yang terjadi bahwa masyarakat telah dilibatkan dalam menyediakan saat menyusun arah kebijakan umum APBD, namun penetapan resmi APBD yang terjadi selama ini belum sepenuhnya berpihak bagi kepentingan masyarakat. Hasil

penelitian Lucyanda & Sari (2012), adanya pengaruh secara signifikan antara partisipasi masyarakat dengan kualitas APBD. Terdapatnya partisipasi yang aktif dilakukan akan menjadikan lebih baiknya APBD. Dimana partisipasi yang dilakukan tersebut membuat anggaran anggaran yang akan bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri.

Senada dengan penelitian menurut Coryanata (2016) bahwa seluruh variable independent seperti partisipasi masyarakat dan akuntabilitas public dalam suatu daerah Bersama-sama mendukung pelaksanaan anggaran daerah agar dapat mencapai sesuai dengan target. Penelitian selanjutnya oleh Putra dan Saputra (2017) menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan variable yang dominan dalam menghasilkan APBD yang berkualitas disamping variable lainnya seperti akuntabilitas public dan pertanggungjawaban organisasi. Penelitian ini didukung oleh (Manginte dkk., n.d.) bahwa semakin baik pelaksanaan masyarakat dalam berpartisipasi terhadap organisasi dan semakin optimal akuntabilitas yang diimplementasikannya maka akan berdampak semakin berkualitas pula Anggaran yang didalamnya merupakan APBD. Novelty dari penelitian ini adalah indikator yang diangkat yang merupakan dasar dalam menyusun

instrument penelitian berupa kuesioner. Kuesioner yang diajukan merupakan pernyataan realistis dan bukan persepsi sehingga responden akan menjawab pernyataan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Partisipasi Masyarakat dalam penganggaran perlu dilaksanakan, agar setiap tahap siklus dari anggaran dapat berjalan dengan baik, maka dapat kita mulai dari penyusunan ratifikasi, pelaksanaan, dan sampai dengan pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2002). Terjadinya fenomena tersebut disebabkan adanya partisipasi masyarakat akan menimbulkan transparansi yang berdampak tidak adanya keborosan serta kebocoran anggaran. Manginte dkk., n.d. menjabarkan bahwa kriteria anggaran dikatakan transparan (disusun oleh pihak Eksekutif), diantaranya : (1) Adanya pengumuman kebijakan anggaran; (2) Adanya dokumen anggaran dan mudah diakses; (3) Adanya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu; (4) Adanya suara/usulan rakyat; (5) Adanya sistem pemberian informasi kepada publik. Sayogo & Harrison (2012) transparansi dan akuntabilitas merupakan perwujudan dari dua sisi mata uang yang sama: transparansi informasi diperlukan untuk menjalankan proses yang meminta pertanggungjawaban pemerintah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Zulfikar (2014) dan Elsa (2004) serta Cahyadi (2015) Transparansi memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah, berpengaruh positif dan signifikansinya menunjukkan transparansi sangat berperan penting terhadap pengelolaan laporan keuangan sehingga terciptanya laporan berkualitas. Lucyanda & Sari (2012) menyatakan, adanya pengaruh secara signifikan, antara transparansi publik dengan kualitas APBD. Pelaksanaan APBD mempunyai kaitan antara transparansi publik dan pengawasan.

Secara umum partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan public yang melakukan/ terlibat pada proses penyusunan APBD sangat kecil, meskipun ada hal tersebut hanya formalitas saja (utopis). Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik dapat kita lihat dari kurangnya keterlibatan masyarakat dan transparansi dalam penyusunan APBD serta program yang diusulkan masyarakat tidaklah banyak yang didanai.

METODE

Menurut Sugiyono (2017) Metode penelitian yakni cara ilmiah untuk mengumpulkan data valid (sahih), bertujuan ditemukannya jawaban, lalu dapat dibuktikan dan dilakukan

pengembangan pengetahuan berikutnya, sehingga dijadikan sebagai pemahaman, pemecahan dan pengantisifasian masalah mendatang. Metode penelitiannya yakni metode deskriptif verifikatif, yang mana artinya yakni memaparkan dan menganalisis kondisi dari masing-masing variable berdasarkan pengumpulan data yang diperoleh berdasarkan rekapitulasi responden. Selanjutnya melakukan pengujian data dan hipotesis untuk mengetahui hipotesis yang kita ajukan diterima atau ditolak.

Jenis Penelitian

Adapun variabel yang diteliti yaitu Kualitas APBD sebagai variabel dependent, dan variabel independent yakni Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan terkait APBD. Lamanya penelitian ini yakni berlangsung selama 8 bulan.

Target/Subjek Penelitian

Tujuannya untuk mengetahui bentuk Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik dalam kualitas APBD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. Beberapa variabel yang diujikan diantaranya Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai variabel

independen. Sedangkan Kualitas APBD sebagai variabel dependen.

Prosedur

Menurut Sugiyono (2017), Sumber Data Primer yakni sumber data yang dihimpun secara langsung yang diberikan pada peneliti. Pada praktik real dilapangan, peneliti memperoleh melalui responden yang dikirim secara langsung kepada pegawai Sub-Bagian Keuangan dan Sub-Bagian Program dan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Data dihimpun melalui metode survei, yakni dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan (kuesioner) berupa hardcopy, yang nantinya akan diisi atau dijawab oleh responden. Pernyataan yang disusun secara sistematis dan telah dipersiapkan sematang mungkin, lalu diajukan kepada responden dan yang terakhir diarahkan kembali pada peneliti. Selanjutnya kuesioner dilakukan seleksi agar didapat isian kuesioner yang dengan kualitas jawaban saja yang dijadikan dalam analisis berikutnya.

Sebagaimana diindikasikan oleh Sugiyono (2017), kerakyatan yakni wilayah spekulasi didalamnya berupa artikel/ subjek dan memenuhi karakteristik dan kualitas yang ditentukan oleh analisis, yang kemudian direnungkan dan dijadikan kesimpulan. Penduduk merupakan perwakilan dari

Sub-Bagian Keuangan dan Sub-Bagian Program dan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. Contoh strategi yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik statistik (contoh basah), dengan tujuan agar jumlah tes yang digunakan adalah informasi sehari setengah. Menurut Narimawati (2010), teknik pengujian adalah cara mencari informasi dan mengurutkan informasi secara efisien, yang kemudian disusun dari hasil persepsi lapangan yang didapat dan diarsipkan dalam klasifikasi, interpretasi ke dalam satuan, melakukan kombinasi, mengatur ke dalam desain, mengambil apa yang penting, dan menentukan jangkauan sehingga pembaca yang berbeda bisa mendapatkannya. Teknik pemeriksaan informasi yang digunakan adalah investigasi informasi. Strategi eksplorasi yang jelas digunakan untuk menggambarkan bagaimana dampak tanggung jawab otoritatif dan tanggung jawab administrasi moneter provinsi terhadap pelaksanaan pemerintahan lingkungan.

Tahapan yang harus dilakukan dalam ujian ekspresif menurut Narimawati (2010) antara lain:

1. Penanda yang dievaluasi oleh responden diurutkan menjadi lima jawaban elektif dengan skala ordinal yang menggambarkan peringkat respons yang sesuai.

2. Perhitungan skor absolut setiap faktor / subvariabel = skor lengkap semua penunjuk faktor untuk semua responden.
3. Perhitungan skor untuk setiap faktor / subvariabel = normal skor lengkap
4. Adanya penggambaran jawaban responden, tahapan ini membutuhkan wawasan yang tidak salah lagi seperti pengulangan sirkulasi dan ditampilkan dalam bentuk tabel atau diagram.
5. Ada gambaran tanggapan untuk setiap faktor, memanfaatkan ruang lingkup:

$$SkorTotal = \frac{SkorAktual}{SkorIdeal} \times 100\%$$

Skor aktual merupakan isian dari keseluruhan responden terhadap kuesioner yang diajukan. lalu skor ideal merupakan bobot tertinggi/ semua responden dapat dikatakan mengisi skor tertinggi. Lebih lengkapnya, dilihat dalam tabel 1.

**Tabel 1. Kriteria Presentase Skor
Tanggapan Responden**

No	% Jumlah Skor	Kriteria
1	20.00-36.00	Tidak Baik
2	36.01-52.00	Kurang Baik
3	52.01-68.00	Cukup Baik
4	68.01-84.00	Baik
5	84.01-100	Sangat Baik

Sumber: (Narimawati, 2010)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung ke lapangan. Populasinya adalah pegawai pada Sub-Bagian Keuangan dan Sub-Bagian Program dan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Rincian pengembalian kuesioner (*response rate*) pada tabel 2.

Tabel 2 Respon Rate

Keterangan	Jumlah	Keterangan
Kuisisioner yang disebar	36	Sampel
Kuisisioner yang tidak kembali	0	
Kuisisioner yang kembali	36	
Tingkat Pengembalian (<i>Respon Rate</i>) (36/36 x 100%)	100%	-

Sumber: Data Primer, diolah 2020

Bila dilihat pada tabel 2, maka tingkat pengembalian kuesioner (*response rate*) adalah 100%, Tingkat pengembalian kuisisioner, berdasarkan kriteria *very good* (sangat baik).

a. Hasil Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Hasil pengolahan hubungan tersebut, didapatkan koefisien koneksi untuk mengetahui tingkat legitimasi benda dan memutuskan kelayakan. Dimana titik putus bilangan dasar (α) yakni 0,05 (5%), menguji standar dengan

cara membandingkan, antara r check dan r tabel.

1) Kualitas APBD (Y)

Pada Tabel 3, menyajikan hasil uji validitas berdasarkan item pernyataan variabel kualitas APBD.

**Tabel 3 Uji Validitas
Kualitas APBD**

keterangan	R hitung	R tabel	Keterangan
Pertanyaan -1	0,513	0,33	Valid
Pertanyaan -2	0,682	0,33	Valid
Pertanyaan -3	0,355	0,33	Valid
Pertanyaan -4	0,309	0,33	Valid
Pertanyaan -5	0,433	0,33	Valid
Pertanyaan -6	0,669	0,33	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS

Dari hasil pengujian pada tabel 3 diatas keenam item pertanyaan menghasilkan koefiensi korelasi yang lebih besar dari r -tabel. Sehingga pertanyaan mampu mengukur kualitas APBD. Berdasarkan hal tersebut, maka item pertanyaan variabel kualitas APBD (Y) dapat dikatakan valid.

2) Partisipasi Masyarakat (X1)

Pada tabel 4, hasil uji validitas pada item pernyataan variabel Partisipasi Masyarakat (X1).

**Tabel 4 Uji Validitas Partisipasi
Masyarakat (X1)**

keterangan	R hitung	R tabel	Keterangan
Pertanyaan -7	0,552	0,33	Valid
Pertanyaan -8	0,480	0,33	Valid
Pertanyaan -9	0,357	0,33	Valid
Pertanyaan -10	0,480	0,33	Valid
Pertanyaan -11	0,342	0,33	Valid
Pertanyaan -12	0,406	0,33	Valid
Pertanyaan -13	0,412	0,33	Valid
Pertanyaan -14	0,410	0,33	Valid
Pertanyaan -15	0,384	0,33	Valid
Pertanyaan -16	0,445	0,33	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS

Hasil pengolahan tabel 4, kesepuluh item pernyataan koefisien korelasi lebih besar dari r-tabel. Maka Partisipasi Masyarakat (X1) dapat dikatakan valid.

3) Transparansi Kebijakan Publik (X2)

Tabel 5, hasil uji validitas pada item pernyataan variabel Transparansi Kebijakan Publik (X2).

Tabel 5 Uji Validitas Transparansi Kebijakan Publik (X2)

keterangan	R hitung	R tabel	Keterangan
Pertanyaan -17	0,541	0,33	Valid
Pertanyaan -18	0,666	0,33	Valid
Pertanyaan -19	0,638	0,33	Valid
Pertanyaan -20	0,683	0,33	Valid
Pertanyaan -21	0,691	0,33	Valid
Pertanyaan -22	0,556	0,33	Valid
Pertanyaan -23	0,679	0,33	Valid
Pertanyaan -24	0,686	0,33	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS (data diolah)

Hasil pengujian pada tabel 5 menjabarkan, kedelapan item

pernyataan lebih besar dari r-tabel. Maka pernyataan mampu mengukur Transparansi Kebijakan Publik (X2) dapat dikatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji keterandalan guna menentukan konsistensi instrumen taksiran, terlepas dari alat taksiran sudah solid atau belum dan tetap andal bila dilakukan taksiran ulang. Perhitungan diolah dengan program SPSS 23, dengan menggunakan teknik *Cronbach Alpha*. Ghazali (2016) dijelaskan bahwa pemberian pengertian tentang kualitas yang teguh biasanya digunakan, diantaranya:

- Ketergantungan dari pendahuluan $\geq 0,60$ menyiratkan bahwa hasil tes berkualitas dan teruji
- Ketergantungan dari pendahuluan $\leq 0,60$ menyiratkan bahwa hasil tes memiliki kualitas yang teruji

Hasil uji kualitas yang tak tergoyahkan ditunjukkan dalam tabel 6

Tabel 6 Hasil Uji Reliabilitas

No	variabel	Cronbach Alpha	kreteria	keterangan
1	Kualitas APBD (Y)	0,828	0,60	Realibel
2	Partisipasi Masyarakat (X1)	0,720	0,60	Realibel
3	Transparansi Kebijakan Publik (X2)	0,676	0,60	Realibel

Sumber: Data Primer, diolah 2020

Dari hasil uji kualitas tak tergoayahkan instrumen di atas, terlihat bahwa estimasi koefisien dependabilitas yang diperoleh setiap faktor lebih menonjol dari 0,60 yang menunjukkan bahwa instrumen estimasi yang digunakan sudah menunjukkan keandalannya sehingga memenuhi kebutuhan untuk digunakan. dalam penyelidikan.

b. Hasil Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan guna mengetahui gambaran tanggapan responden terhadap setiap pernyataan yang diajukan maupun variabel penelitian secara keseluruhan yang meliputi Partisipasi Masyarakat Transparansi Kebijakan Publik dan kualitas APBD. Dalam penelitian ini, tanggapan responden terhadap pernyataan yang disajikan berupa tabel distribusi frekuensi dan persentase, sehingga mempermudah peneliti dalam menjelaskan hasil tanggapan responden.

1) Tanggapan Responden terkait Partisipasi Masyarakat (X1)

Dari hasil uji kualitas kesetiaan instrumen, terlihat dengan sangat baik bahwa koefisien keterpercayaan yang dinilai yang diperoleh masing-masing faktor lebih terlihat dari 0,60 yang menunjukkan bahwa instrumen penilaian yang digunakan telah menunjukkan keandalannya sehingga menjawab masalah yang akan

digunakan. sedang diteliti.

Tabel 7. Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Variabel Partisipasi Masyarakat

No	Indikator	Butir Pernyataan	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Terdapatnya pemahaman penyelenggaraan negara tentang proses atau metode partisipatif	P-7	116	180	64,4%	Cukup Baik
		P-8	123	180	68,3%	Baik
2	Terdapatnya pengambilan keputusan yang dilandaskan konsensus bersama.	P-9	124	180	69%	Baik
		P10	110	180	61,1%	Cukup Baik
		P-11	98	180	54,3%	Cukup Baik
3	Terdapat peningkatan kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah.	P-12	110	180	61,1%	Cukup Baik
		P-13	122	180	67,7%	Cukup Baik
4	Adanya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan yang dilakukan pemerintah	P-14	129	180	71,6%	Baik
		P-15	129	180	71,6%	Baik
Total			1167	1800	64,8%	Cukup Baik

Sumber: Output SPSS, data diolah 2020

Dari tabel di atas menunjukkan hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Partisipasi Masyarakat sebesar 1167 (64,8%) berada dalam interval 52% - 68%. Yang dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Partisipasi Masyarakat berada dalam kategori cukup baik. Namun masih ada gap sebesar 35,2% hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam variabel Partisipasi Masyarakat.

2) Tanggapan Responden pada Transparansi Kebijakan Publik (X2).

Untuk mengetahui persepsi atau tanggapan responden terhadap

setiap indikato mengenai Transparansi Kebijakan Publik, peneliti menggunakan nilai persentase skor Pada variabel Transparansi Kebijakan Publik terdiri dari 2 (dua) item dari indikator : *Invormativeness* (informatif) dan *Disclosure* (pengungkapan). Berikut ini disajikan persentase mengenai Transparansi Kebijakan Publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 8. Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Variabel Transparansi Kebijakan Publik (X2)

No	Indikator	Butir Pernyataan	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	<i>Invormativeness</i> (informatif)	P-17	126	180	70%	Baik
		P-18	117	180	65%	Cukup Baik
		P-19	124	180	68,4%	Baik
		P-20	119	180	66,1%	Cukup Baik
		P-21	114	180	63%	Cukup Baik
2	<i>Disclosure</i> (pengungkapan)	P-22	98	180	54,4%	Cukup Baik
		P-23	110	180	61,1%	Cukup Baik
		P-24	111	180	61,6%	Cukup Baik
Total			919	1440	63,8%	Cukup Baik

Sumber: Output SPSS, data di olah 2020

Dari tabel 8 menunjukkan, hasil pengolahan persentase total skor dari variabel Transparansi Kebijakan Publik sebesar 919 (63,8%), berada dalam interval 52% - 68%, yang artinya variabel Transparansi Kebijakan Publik berkategori cukup baik. Maka terdapat gap sebanyak 36,2%, praktik dilapangan didapat kelemahan pada variabel Transparansi Kebjakan Publik.

3) Tanggapan Responden Pada Kualitas APBD (Y).

Untuk mengetahui persepsi atau tanggapan responden terhadap setiap indikator mengenai Kualitas APBD, peneliti menggunakan nilai persentase skor Pada variabel kualitas APBD terdiri dari 2 (dua) item dari indikator: Proses penyusunannya yang telah mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas, partisipasi, transparansi dan proses penyusunannya menggunakan pendekatan kinerja (*performance budgeting*). Anggaran yang bertumpu pada kepentingan masyarakat. Berikut disajikan persentase dari kualitas APBD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 9. Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Variabel Kualitas APBD (Y)

No	Indikator	Butir Pernyataan	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas, partisipasi, transparansi dan proses penyusunannya menggunakan pendekatan kinerja (<i>performance budgeting</i>) pada proses penyusunan	P-1	148	180	82,2%	Baik
		P-2	105	180	58,3%	Cukup Baik
		P-3	135	180	75%	Baik
		P-4	145	180	80%	Baik
2	Anggaran yang bertumpu pada kepentingan masyarakat	P-5	112	180	62,2%	Cukup Baik
		P-6	132	180	73,3%	Baik
Total			786	1080	71,9	Baik

Sumber: Output SPSS, data di olah 2020

Dari tabel 9 menunjukkan, persentase total skor dari variabel Kualitas APBD yakni 786 (71,9%), dengan interval 68% - 84%. Disimpulkan bahwa variabel kualitas APBD berkategori baik. Maka terdapat gap sebanyak 28,1%, praktik dilapangan didapat kelemahan pada variabel kualitas APBD.

c. Pembahasan

1) Implementasi Partisipasi Masyarakat terhadap Kualitas APBD

Hasil dari analisis deskriptif yang dilakukan menunjukkan bahwa rata-rata skor dari variabel Partisipasi sebesar 64,8%, skor tersebut masuk kedalam kategori cukup baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi partisipasi masyarakat terhadap kualitas APBD sudah cukup baik. Namun masih ada gap sebesar 35,2%, terdapat kelemahan dalam variabel Partisipasi masyarakat. Hal ini telah menjawab fenomena bahwa partisipasi masyarakat masih lemah atau belum optimal dalam menunjang kualitas APBD. Fenomena yang terjadi pemerintah daerah masih belum bisa menjelaskan sumber dana dan penyerapan dana yang terjadi pada masa covid ini (Moynihan, 2003). Oleh karena itu tujuan utama dari pendekatan partisipasi ini adalah menuju representasi yang lebih besar dan langsung dari semua warga negara. Semua warga negara harus bisa

memberikan masukan, bukan hanya mereka yang memenuhi syarat pemilu, jabatan, keahlian, pengaruh, atau uang seperti yang disampaikan oleh Putra & Saputra (2017).

Hasil penelitian ini didukung teori Mardiasmo (2009) APBD yang berkualitas dihasilkan oleh adanya keterlibatan masyarakat dalam siklus anggaran yaitu 1) Adanya persiapan anggaran (preparation), 2) Adanya ratifikasi (approval/ ratification), 3) Adanya implementasi (implementation), dan 4) Adanya pelaporan dan evaluasi (reporting and evaluation). Menurut Ríos et al., (2017) Semakin tinggi keterlibatan publik dan semakin tinggi transparansi anggaran, semakin sah pengambilan keputusan pemerintah. Pemerintah harus membuka jalan menuju pembangunan ekonomi, bukan menjadi penghalang, seperti yang diteliti oleh Coryanata (2016).

Handayani, (2009), menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara partisipasi masyarakat dengan kualitas APBD. Hasil responden menunjukkan adanya partisipasi aktif masyarakat akan menjadikan kualitas APBD lebih baik, baik dalam hal penyusunan, pelaksanaan serta pengawasan.

Maka dapat disimpulkan bahwa dengan partisipasi masyarakat yang belum optimal dilakukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan mengakibatkan kualitas APBD yang

didapatkan belum optimal. Partisipasi masyarakat yang belum optimal tersebut disebabkan karena keterlibatan masyarakat dalam memberi masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD, dinilai masih rendah. Diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif dalam penyusunan anggaran agar dapat meningkatkan kualitas APBD. Oleh karena itu, H1 yang berbunyi Implementasi Partisipasi masyarakat terhadap kualitas APBD belum optimal diterima. Menurut Erlina et al (2017) tingkat kerjasama dipengaruhi oleh tingkat pengajaran, posisi masyarakat, status moneter daerah setempat, sehingga setiap individu akan diberikan alternatif jenis investasi. Latihan partisipatif yang bergantung pada latihan menyumbangkan pikiran, aktivitas, anggapan, dinamis, dan berpikir kritis akan menjadi kuat, jika area lokal dapat berjalan dengan efektif.

2) Implementasi Transparansi Kebijakan Publik terhadap Kualitas APBD

Hasil dari analisis deskriptif yang dilakukan menunjukkan, rata-rata skor dari Variabel Transparansi Kebijakan Publik sebesar 63,8%, skor tersebut masuk kedalam kategori cukup baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi transparansi kebijakan publik terhadap kualitas APBD sudah cukup baik. Namun masih ada gap sebanyak 36,2%, maka terdapat

kelemahan dalam variabel Transparansi Kebijakan Publik. Hal ini telah menjawab fenomena bahwa transparansi kebijakan publik masih lemah atau belum optimal dalam menunjang kualitas APBD. Fenomena yang terjadi masih terjadinya penyelewangan anggaran terutama untuk dimasa covid ini, masih terdapatnya keluhan dari masyarakat. Dan kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran percepatan penanganan covid-19 ini, seperti yang disampaikan oleh Putra dan Saputra, (2017).

Hasil penelitian diperkuat hipotesis dari Achmadi et al., (2002), mengungkapkan hasil dari keterusterangan pemerintah, khususnya dengan menjamin masyarakat untuk bekerjasama, khususnya dalam interaksi pembuatan pengaturan dan perincian APBD, ketika hal tersebut sudah dapat diakses oleh masyarakat maka bentuk transparansi publik sudah dapat diterapkan dalam proses penyusunan APBD dan dapat meningkatkan kualitas APBD. Menurut Heald, (2012) Inti dari transparansi ini adalah gagasan bahwa realita yang mendasari pengeluaran publik harus dibuat terlihat dan dipahami oleh komunitas pengguna yang teridentifikasi. Produksi dan distribusi informasi itu sendiri tidak cukup, karena transparansi membutuhkan audiens yang memiliki kapasitas untuk memahami dan bertindak.

Selaras dengan Lucyanda & Sari (2012), terdapat pengaruh signifikan antara transparansi publik dengan kualitas APBD. Hasil responden menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara transparansi publik dengan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Benito & Bastida (2009) Kurangnya transparansi anggaran dapat meningkatkan kebingungan pemilih dan mengurangi komitmen politisi untuk bertanggung jawab secara fiskal. Kurangnya transparansi dan kebingungan pemilih dapat berdampak negatif pada kontrol anggaran yang efektif, terutama bila diperlukan penyesuaian fiskal yang substansial.

Maka dapat disimpulkan bahwa dengan transparansi yang belum optimal dilakukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan mengakibatkan kualitas APBD yang didapatkan belum optimal. dan transparansi yang belum optimal tersebut disebabkan kurang memadainya akses serta ketersediaan informasi untuk dapat diakses dan dipantau. Oleh karena itu, H1 yang berbunyi Implementasi Partisipasi masyarakat terhadap kualitas APBD belum optimal diterima. Sebagaimana menurut Elliott & Resnik (2014) Transparansi dapat meningkatkan kepercayaan publik dengan membantu orang awam memahami bagaimana bukti empiris dan asumsi nilai masuk ke dalam pengambilan keputusan ilmiah

dan pembentukan kebijakan.

Berdasarkan pembahasan tersebut bahwa APBD yang diimplementasikan akan mencapai kualitas yang diharapkan apabila didukung penuh oleh partisipasi masyarakat secara kontinyu serta akuntabilitas publik yang optimal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil analisis data dan pembahasan, maka menghasilkan dua kesimpulan utama yakni yang pertama Implementasi Partisipasi Masyarakat terhadap Kualitas APBD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan cukup baik namun belum sepenuhnya optimal, dimana masih kurangnya partisipasi yang dilakukan. Oleh karena itu, sebaiknya partisipasi lebih ditingkatkan lagi agar dapat meningkatkan kualitas APBD. Dan yang kedua yaitu Implementasi Transparansi Kebijakan Publik terhadap Kualitas APBD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan cukup baik namun belum sepenuhnya optimal, dimana masih kurangnya transparansi yang dilakukan. Oleh karena itu, sebaiknya transparansi lebih ditingkatkan lagi agar dapat meningkatkan kualitas APBD.

Saran

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi perkembangan ilmu akuntansi terkait pengaruh Partisipasi

Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap kualitas APBD

- 2) Para peneliti selanjutnya untuk mengembangkan keilmuan terkait kebijakan publik

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Muslim, A., & Dkk. (2002). *Good governance dan Penguatan Institusi Daerah*. masyarakat transparansi indonesia.
- Anggadini, S. D. (2013). Analisis Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer Dalam Proses Pengambilan Keputusan. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 11(2), 176–187. <https://doi.org/10.36342/teika.v8i2.2327>
- Badrudin, R. (n.d.). *Ekonomika Otonomi Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Benito, B., & Bastida, F. (2009). Budget Transparency, Fiscal Performance, and Political Turnout: An International Approach. *Public Administration Review*, 69(3), 403–417. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2009.01988.x>
- Cahyadi, F. A. (2015). *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Chortareas, G., Stasavage, D., & Sterne, G. (2003). Does Monetary Policy Transparency Reduce Disinflation Costs? *Manchester School*, 71(5), 521–540. <https://doi.org/10.1111/1467-9957.00365>
- Coryanata, I. (2016). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transfaransi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggran dan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 12(2), 110–125. <http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/678>
- Elliott1, K. C., & Resnik2, D. B. (2014). Science, Policy, and the Transparency of Values. *Environmental Health Perspectives*, 122(11), A291–A292. <https://doi.org/10.1289/ehp.1408936>
- Elsa, A. (2004). *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. 11–53.
- Erlina, Tarigan, Z. A., & Muda, I. (2017). Antecedents of Budget Quality Empirical Evidence From Provincial Government in Indonesia. *International Journal of Economic*

- Research*, 14(12), 301–312.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Graversgaard, M., Jacobsen, B. H., Kjeldsen, C., & Dalgaard, T. (2017). Stakeholder Engagement and Knowledge Co-Creation in Water Planning: Can Public Participation Increase Cost-Effectiveness? *Water (Switzerland)*, 9(3), 1–29. <https://doi.org/10.3390/w9030191>
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2016). *Teori Konsep dan Aplikasi :Akuntansi Sektor Publik, Cetakan kedua*. Salemba empat.
- Handayani, B. D. (2009). *Pengaruh Reformasi Penyusunan Anggaran terhadap Kualitas APBD Kota Semarang*. 1(1), 31–40.
- Heald, D. (2012). Why is Transparency About Public Expenditure So Elusive? *International Review of Administrative Sciences*, 78(1), 30–49. <https://doi.org/10.1177/0020852311429931>
- Innes, J. E., & Booher, D. E. (2004). Reframing Public Participation: Strategies for The 21st Century. *Planning Theory and Practice*, 5(4), 419–436.
- <https://doi.org/10.1080/1464935042000293170>
- Lucyanda, J., & Sari, M. P. (2012). Reformasi Penyusunan Anggaran dan Kualitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd). *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 1(2), 76–85. <https://doi.org/10.15294/jda.v1i2.1914>
- Maisarah, F. . S. (2014). *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Publik, dan APBD Berbasis Kinerja terhadap Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Banda Aceh*. ETD Unsyiah.
- Manginte dkk. (n.d.). *Pengetahuan Anggaran Serta Peran Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik Dan Budaya Politik Terhadap Pengawasan Keuangan Anggota DPRD (Studi Kasus di Jayapura)*.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntabilitas Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Moynihan, D. P. (2003). Normative and Instrumental Perspectives on Public Participation: Citizen Summits in Washington, D.C. *American Review of Public Administration*, 33(2), 164–188.

- <https://doi.org/10.1177/0275074003251379>
- Narimawati, U. (2010). *Metodologi Penelitian : Dasar Penyusunan Penelitian Ekonomi*. Genesis.
- Puspitawati, L., & Sri Dewi Anggadini. (2011). *Sistem Informasi Akuntansi*. Graha Ilmu.
- Putra, F., & Saputra, M. (2017). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik Dan Pengetahuan Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Bener Meriah). *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 10(1), 47–56.
- Ríos, A. M., Benito, B., & Bastida, F. (2017). Factors Explaining Public Participation in the Central Government Budget Process. *Australian Journal of Public Administration*, 76(1), 48–64. <https://doi.org/10.1111/1467-8500.12197>
- Sari, I. M., & Tamrin, A. (2017). Pengaruh Penerapan Good Government Governance Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. *Kendari: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UHO*.
- Sayogo, D. S., & Harrison, T. (2012). Effects of The Internet and Sociocultural Factors on Budget Transparency and Accountability. *ACM International Conference Proceeding Series*, 11–20. <https://doi.org/10.1145/2307729.2307733>
- Suhayati, E. dan Sri Dewi Anggadini, & (2014). *Dasar akuntansi*. rekayasa sains.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Zulfikar, M. F. (2014). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan. *Journal of Chemical Information and Modeling*.

Profile Penulis :

Sri Dewi Anggadini, Menyelesaikan pendidikan S3 ilmu Akuntansi di Universitas Padjadjaran Bandung. Saat ini menjadi dosen tetap di salah satu Universitas terbaik di Kota Bandung dan menjadi dosen luar biasa di beberapa Perguruan Tinggi Swasta serta aktif sebagai tenaga ahli di bidang Akuntansi.

Tatik Rohmawati, Menyelesaikan pendidikan S2 ilmu Politik di Universitas Padjadjaran Bandung. Saat ini menjadi dosen tetap Ilmu Pemerintahan di salah satu Universitas terbaik di Kota Bandung dan menjadi dosen luar

biasa di beberapa Perguruan Tinggi Swasta.

Sari Damayanti , Menyelesaikan pendidikan S2 di Institut Teknologi Bandung. Saat ini menjadi dekan serta dosen tetap di salah satu Institut terbaik di Kota Bekasi dan aktif dalam kajian-kajian serta tenaga ahli di bidang manajemen dan industri.

Ari Bramasto Menyelesaikan pendidikan S2 ilmu Akuntansi di Universitas Padjadjaran Bandung. Saat ini menjadi dosen tetap di salah satu Universitas terbaik di Kota Bandung dan menjadi dosen luar biasa di beberapa Perguruan Tinggi Swasta serta aktif sebagai tenaga ahli dan konsultan di bidang Akuntansi dan perpajakan.